

**ANALISIS TERHADAP KEGAGALAN USULAN KEBIJAKAN
LINGKUNGAN *CARBON POLLUTION REDUCTION SCHEME*
(CPRS) DI PARLEMEN AUSTRALIA PADA MASA
PEMERINTAHAN KEVIN RUDD TAHUN 2007 - 2010**

Ayudya Aroem Brilliane¹
Septyanto Galan Prakoso, S.I.P., M.Sc.²

Abstract

The Australian government's policy toward the effort to reduce carbon emissions that cause global warming becomes the main topic examined in this research. The Australian government's policy is being analyzed from the aspects of agenda setting policy and formulation policy. This research uses a qualitative approach with literature study, interview, and questionnaires as the technique of the data collection. Data analysis draws on qualitative analysis consisted of multiple steps such as data reduction, analysis, data presentation, and then drawing conclusions. The conceptual framework of this research departs from the analysis of agenda setting policy, formulation policy, and bureaucratic politics approach.

The result of this research shows that CPRS policy came to a failure at the stage of formulation policy because it was not passed by parliament, especially at the level of Senate that rejected it twice. While factor of the CPRS failure was economic issue that brought by the Liberal Party. If the CPRS passed into a policy that implemented in Australia, it will affect the Australian economy decline. Besides, implementation of the CPRS will cause multiple effects widely. So, it can be concluded CPRS that proposed by Kevin Rudd's government is a boomerang for ALP because the workers who are the people who want to ALP protect it even affected the CPRS.

Keywords: Policy Making Process, Australia's Environmental Policy, Global Warming, Bureaucratic Politics Approach, Australian Labor Party.

¹ Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

² Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pendahuluan

Kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup sebenarnya sudah mulai berkembang sejak pertengahan abad 18. Akan tetapi, isu ini baru benar-benar mendapatkan perhatian publik pasca berakhirnya Perang Dingin. Keruntuhan Uni Soviet pada awal dekade 1990an, menjadi salah satu faktor pendorong munculnya isu lingkungan menjadi isu global, berdampingan dengan isu besar lainnya dalam tataran hubungan internasional seperti: *national interest and security*, ekonomi, serta konflik negara. Adanya *awareness* komunitas internasional yang dihadapkan pada realitas perubahan lingkungan secara global juga menjadi faktor selanjutnya mengapa isu lingkungan beralih dari yang awalnya hanya dianggap sebagai bagian dari *low politics*, menjadi *central politics*.

Dampak yang dirasakan dari krisis lingkungan kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk mengadakan berbagai forum dalam tingkat regional maupun internasional yang bertujuan untuk membahas upaya penanggulangan permasalahan lingkungan hidup tersebut. Forum internasional tentang lingkungan yang pertama kali diselenggarakan adalah *Stockholm Conference* pada tahun 1972. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan jawaban terhadap semakin menurunnya kualitas lingkungan. Keputusan untuk menyelenggarakan *Stockholm Conference* di Swedia juga didasari oleh semakin meningkatnya *concern* masyarakat dunia terkait lingkungan serta munculnya kekhawatiran dari banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa.¹ *Stockholm Conference* menjadi tonggak awal pembahasan permasalahan lingkungan hidup pada akhirnya melahirkan *Stockholm Declaration*. Prinsip-prinsip *Stockholm Conference* sendiri diantaranya adalah sumber daya alam yang harus dijaga, polusi tidak boleh melebihi kapasitas lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditingkatkan untuk perbaikan lingkungan, serta kebijakan pembangunan yang tidak menghambat lingkungan hidup untuk tumbuh sehat.²

¹ Abdi Sapta Gelora Aritonang, "Kajian Isu Pemanasan Global, Sebuah Kritik Terhadap Studi Lingkungan Hidup Dalam Paradigma Hubungan Internasional," *The Global Review*, 20 Juni 2012, dilihat 15 Mei 2016, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#.VzmlfyG4Z_k

² "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment," United Nations Environment Programme, dilihat 14 Juni 2016, <http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503>

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

Setelah *Stockholm Conference*, tahun 1992 bertempat di Rio de Janeiro, Brazil, diadakan konferensi dengan nama *United Nations on Environment and Development* (UNCED) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Earth Summit*. Konferensi tersebut menghasilkan dua keputusan yaitu Agenda 21 dan pembentukan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Konferensi tersebut membahas tentang aturan mengenai pengurangan gas emisi rumah kaca. Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam UNFCCC setiap tahunnya mengadakan pertemuan dalam *Conference of Parties* (COP). Pada pertemuan COP ketiga yang diselenggarakan di Jepang pada tanggal 11 Desember 1997, forum tersebut berhasil menyepakati sebuah perjanjian terkait dengan perubahan iklim yang dikenal dengan nama *Kyoto Protocol*. Dengan meratifikasi *Kyoto Protocol*, maka negara-negara yang terlibat di dalamnya harus menaati peraturan yang telah disepakati yaitu membatasi atau mengurangi kadar emisi CO₂. Negara industri diwajibkan untuk memotong emisi gas rumah kaca sebesar 5 persen dari emisi tahun 1990.³

Australia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi Protokol Kyoto tersebut. Dibawah pemerintahan Kevin Rudd pada periode 2007 – 2010, Australia mulai aktif dalam menanggapi isu lingkungan hidup, khususnya dalam hal perubahan iklim. Setelah kemenangan Partai Buruh dalam pemilihan presiden bulan November 2007, di tahun yang sama tepatnya tanggal 3 Desember, Perdana Menteri Kevin Rudd meratifikasi *Kyoto Protocol*. Kevin Rudd kemudian mengusulkan kebijakan yang dikenal sebagai *Carbon Pollution Reduction Scheme* (CPRS) yaitu skema perdagangan emisi karbon untuk mengurangi gas emisi rumah kaca di Australia. Hal ini dilakukan mengingat menurut perhitungan Protokol Kyoto, total gas emisi rumah kaca bersih Australia pada tahun 2006 adalah sebesar 576 MtCO₂-e. Jumlah emisi ini meningkat 4.2% dibandingkan level tahun 1990, yaitu 552.6 MtCO₂-e.⁴ Namun, usulan tersebut tidak berhasil diimplementasikan karena telah menemui kegagalan akibat penolakan di tingkat parlemen bahkan hingga dua kali.

Adanya kegagalan yang dialami oleh usulan kebijakan CPRS tersebut tentunya sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis lebih lanjut terkait faktor apa yang menyebabkan kegagalan usulan kebijakan lingkungan CPRS pada pemerintahan Kevin Rudd. Penelitian ini akan juga

³ “Kyoto Protocol Reference Manual,” United Nations Framework Convention on Climate Change, dilihat 1 Juni 2016, https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf

⁴ “National Greenhouse Gas Inventory 2006 Accounting for the Kyoto Target,” Departement of Climate Change: Australia’s National Greenhouse Accounts, dilihat 25 Januari 2017, http://www.egovernment.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/57133/inventory2006.pdf, 1

mencoba menyoroti kebijakan tersebut dari proses pembuatan kebijakannya, seperti pada tahap penyusunan agenda dan formulasi kebijakan.

Kemenangan Kevin Rudd dalam Pemilu Nasional 2007

Kevin Rudd terpilih menjadi anggota *house of representative* Australia tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 1998, 2001, dan 2004. Setelah pemilihan nasional pada tahun 2001, Kevin Rudd ditunjuk menjadi *shadow minister* untuk Kementerian Luar Negeri. Secara perlahan, nama Kevin Rudd mulai dikenal publik, terutama saat Kevin Rudd menjabat sebagai *spokesperson* urusan luar negeri di partainya. Rudd secara tidak langsung “membangun *image*” di depan publik dengan memberikan kritik keras terhadap kebijakan Howard dalam keterlibatan Australia di Perang Irak⁵ serta mulai menguak dugaan adanya korupsi di pemerintahan *koalisi Liberal-Nasional* khususnya dalam *Australian Wheat Board (AWB)* yaitu badan yang melakukan monopoli terhadap ekspor gandum Australia. Kevin Rudd bahkan menyebut tindak korupsi tersebut sebagai “*one of the biggest scandals to hit the Howard government*”.⁶

Pada bulan Desember 2006, Kevin Rudd memenangkan kaukus ALP untuk kemudian dipilih menjadi pemimpin partai.⁷ Sedangkan jabatan *deputy* atau wakil diduduki oleh Julia Gillard. Partai melihat individu Kevin Rudd yang mewakili faksi partai sayap kanan (*Labor right/Labor Unity*) dapat melengkapi Julia Gillard yang berasal dari faksi partai sayap kiri (*Labor left/Victorian Socialist Left*). Hal ini dikarenakan *Labor right* lebih cenderung mengurus hal-hal seperti kebijakan pasar bebas, mendukung aliansi dengan Amerika Serikat, namun sedikit konservatif terhadap isu-isu sosial; sedangkan *Labor left* lebih memilih intervensi negara dalam hal perekonomian, kurang mendukung aliansi dengan Amerika Serikat, dan sangat peduli kepada isu-isu sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan umum serta kesetaraan.

Setelah melalui proses penyesuaian karena kedua individu berasal dari fraksi yang berbeda meskipun sama-sama dibawah naungan ALP, Kevin Rudd dan Julia Gillard dipercaya maju dalam pemilu nasional tahun 2007 untuk melawan John Howard dan wakilnya, Mark Vaile. Selama proses kampanye berlangsung, Kevin Rudd banyak menyoroti isu-isu penting yang tidak dikerjakan oleh pemerintahan

⁵ “Kevin Rudd Biography,” Biography, dilihat 13 November 2016, <http://www.biography.com/people/kevin-rudd-38602#synopsis>

⁶ Rick Kelly, “Australian Wheat Board implicated in “oil-for-food scandal,” *World Socialist Web Site*, 14 November 2005, dilihat 13 November 2016, <https://www.wsws.org/en/articles/2005/11/awb-n14.html>

⁷ Kevin Rudd Biography, *loc.cit.*

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

yang sebelumnya dipegang oleh Howard. Menurut Kevin Rudd, dalam 11 tahun kepemimpinan Howard di Australia, Howard tidak mengerti tantangan apa yang akan dihadapi Australia di masa yang akan datang. Hal ini disampaikan bersamaan dengan isu-isu yang akan diperjuangkan oleh Kevin Rudd dan Julia Gillard, dalam pidato kampanye yang berlangsung di Brisbane, tanggal 14 November 2007.⁸

Secara garis besar, dalam pidato tersebut Kevin Rudd membawa enam isu utama yang akan diperjuangkan bila terpilih nanti. Keenam isu tersebut adalah:

- a. Perubahan iklim dan permasalahan air (*Climate change and water*)
- b. Komunikasi dan teknologi (*Communications and technology*)
- c. Ekonomi (*Economy*)
- d. Pendidikan (*Education*)
- e. Kesehatan (*Health*)
- f. Hubungan industry (*Industrial relations*)

Berdasarkan artikel yang dirilis oleh *The Age*,⁹ popularitas Kevin Rudd terus meningkat dibandingkan dengan John Howard. Hal ini diakibatkan karena masyarakat menilai Kevin Rudd lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh Australia, salah satunya adalah sikap Kevin Rudd yang cukup serius dalam menanggapi isu perubahan iklim dan permasalahan air di Australia. Permasalahan ini diangkat selain karena sesuai dengan tujuan atau *goals* yang tercantum dalam ALP *National Platform* tahun 2007 khususnya pada *Chapter 9: Combating Climate Change and Building a Sustainable Environment* khususnya pada sub bagian *climate change* dan *cutting greenhouse gas emissions*,¹⁰ namun juga karena Kevin Rudd ingin mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang salah satu prinsipnya adalah pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem. Prinsip tersebut memiliki empat poin yaitu; melindungi sistem penunjang kehidupan, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik; memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem yang rusak; serta mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan.¹¹ Sebagai bentuk

⁸ “Kevin Rudd Election Speech Transcript,” Australian Federal, 14 November 2007, dilihat 13 November 2016, <http://electionspeeches.moadoph.gov.au/speeches/2007-kevin-rudd>

⁹ Artikel berjudul “Howard in Dilemma as Polls Fail to Deliver,” tanggal 6 Oktober 2007 dan “Australia's Howard Behind in Polls on Election Eve,” tanggal 23 November 2007.

¹⁰ Australian Labor: National Platform and Constitution (2007), 136.

¹¹ Dewi Triwahyuni, “Sustainable Development: Paradigma Baru Metode Pembangunan Ekonomi,” *UNIKOM*, dilihat 13 November 2016, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=38415>

keseriusan untuk mengatasi ancaman krisis ekologi, Kevin Rudd telah berencana untuk menggandeng *Green Party* atau *the Greens* sebagai partner dalam pembuatan kebijakan lingkungan, mengingat *the Greens* merupakan afiliasi dari ALP.

Lebih lanjut, seperti yang dikutip dalam buku milik Peter Hartcher yang berjudul *To The Bitter End: the Dramatic Story behind the Fall of John Howard and the Rise of Kevin Rudd*, popularitas Kevin Rudd semakin meningkat saat Kevin Rudd menyatakan akan meratifikasi Protokol Kyoto dan penyampaian permohonan maaf kepada Suku Aborigin atas peristiwa *stolen generations*.¹² Hal ini sejalan dengan survey yang diadakan oleh penulis. Menurut hasil dari survey tersebut,¹³ 7 dari 15 responden memilih janji kampanye Kevin Rudd seperti permintaan maaf pada *stolen generations* dan penanggulangan perubahan iklim sebagai faktor utama kemenangan Kevin Rudd dalam pemilu 2007. Sedangkan 6 responden lainnya berpendapat bahwa kemenangan tersebut disebabkan karena masyarakat Australia sudah jenuh dengan 11 tahun pemerintahan Howard, dan menginginkan gaya kepemimpinan baru. Sisanya, memilih karakter Kevin Rudd karena Rudd memiliki kepribadian yang rendah hati, serta merupakan *good negotiator* mengingat Rudd adalah seorang mantan diplomat di Stockholm dan Beijing.

Sikap Rudd saat kampanye sangat berkebalikan dengan Howard yang pada saat menjabat sebagai perdana menteri cenderung acuh terhadap isu perubahan iklim dunia dan HAM. Saat itu, Howard menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto karena akan menelan biaya atau *cost* ekonomi yang cukup besar dan dapat merusak industri di Australia.¹⁴ Padahal Australia merupakan salah satu eksportir terbesar yang membuat negara ini memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap karbon. Dalam sesi negosiasi pembahasan Protokol Kyoto, seorang negosiator dari pihak Kyoto menawarkan kemungkinan untuk meningkatkan emisi karbon sebesar 5 persen dari emisi tahun 1990 di tahun 2012 mendatang, namun Howard menginstruksikan kepada para menterinya untuk melakukan *walkout* dari perundingan, kecuali emisi karbon tersebut ditingkatkan menjadi 8 persen.¹⁵ Seorang juru bicara lingkungan dari ALP, Kelvin Thomson, sangat menyayangkan hal tersebut serta mengatakan bahwa

¹² Peter Hartcher, *To The Bitter End: the Dramatic Story behind the Fall of John Howard and the Rise of Kevin Rudd* (New South Wales: Allen & Unwin, 2009), 261.

¹³ Survey oleh penulis, "Australia Political Issues Survey (Kevin Rudd Regime 2007-2010)"

¹⁴ "Australia Rejects Kyoto Pact," BBC News, 5 Juni 2002, dilihat 20 November 2016, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2026446.stm>

¹⁵ Peter Hartcher, *op.cit*, 68

Australia telah kehilangan kesempatan penting dalam mendukung langkah dunia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.¹⁶

Setelah masa kampanye yang berlangsung selama 39 hari atau 6 minggu, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2007 dilaksanakanlah pemilihan federal Australia yang ke 42 dengan kandidat partai koalisi Liberal Nasional yaitu John Howard dan Mark Valle, melawan pasangan Kevin Rudd dan Julia Gillard dari ALP. Hasil pemilu tersebut akhirnya dimenangkan oleh ALP dengan raihan suara sebesar 43,4 persen dan mendapatkan 83 kursi dari 150 kursi yang tersedia di HoR.¹⁷ Berdasarkan perolehan kursi mayoritas di tingkat HoR tersebut yang dimenangkan oleh ALP, maka ALP berhak menempatkan Kevin Rudd sebagai perdana menteri Australia ke-42.

Kebijakan Lingkungan Australia pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd

Setelah resmi dilantik menjadi perdana menteri Australia ke-26 pada tanggal 3 Desember 2007, peratifikasian Protokol Kyoto menjadi pencapaian awal Kevin Rudd pada masa itu. Tindakan Kevin Rudd tersebut menunjukkan keseriusan pemerintahan Australia untuk menjadikan permasalahan lingkungan hidup sebagai salah satu fokus kebijakan. Sesuai dengan konstitusi Partai Buruh dan janji kampanye Kevin Rudd yang akan membenahi kelangkaan air dan perubahan iklim, Kevin Rudd membuat dua kebijakan yaitu *Water Act Policy* serta *Carbon Reduction Pollution Scheme* (CPRS).

Water Act Policy (WA) merupakan sebuah kebijakan pengelolaan sumber daya air dari *Murray-Darling Basin* (MDB) yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan air bersih, menjamin pengelolaan MDB sesuai dengan fungsinya, melindungi kelestarian ekosistem alami yang terdapat di MDB, dan meningkatkan kualitas air MDB agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Australia.¹⁸ Kebijakan tentang *water reform*, pada dasarnya, sudah ada di Australia sejak tahun 1992 melalui *Murray Darling Bassin Agreement* yang membahas mengenai pengaturan pembiayaan untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya air MDB, serta upaya pemeliharaan ketersediaan sumber air MDB agar tetap terjaga dengan baik. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur pembagian air antara tiga negara bagian di Australia yang dilewati oleh MDB, yaitu *New South Wales*, *Victoria* dan

¹⁶ Louise Dodson dan Josh Gordon, "Howard defiant on Kyoto rejection," *The Age*, 5 September 2002, dilihat 20 November 2016, <http://www.theage.com.au/articles/2002/09/04/1031115885007.html>

¹⁷ "Australia Votes 2007," ABC Elections, modifikasi terakhir 21 Desember 2007, dilihat 20 November 2016, <http://www.abc.net.au/elections/federal/2007/>

¹⁸ "Water Act 2007," Australian Government, dilihat 3 Januari 2017, <https://www.legislation.gov.au/Details/C2007A00137>

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

Southern Australia. Murray Darling Bassin Agreement tersebut kemudian dilanjutkan oleh kebijakan *Water Reform Framework* pada tahun 1994, dan *National Water Initiative* pada tahun 2004.

Melihat kondisi MDB yang semakin kritis akibat buruknya sistem drainase sungai, rusaknya ekosistem alami di sepanjang aliran air MDB, dan penggunaan konsumsi air yang tidak efisien oleh industri manufaktur serta pertanian, Kevin Rudd berinisiatif untuk meneruskan kebijakan *water reform* sebagai respon terhadap ancaman kekeringan dan dampak perubahan iklim di Australia. MDB merupakan salah satu sumber air bersih yang menopang hampir 4 juta masyarakat Australia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan keberlangsungan industri.¹⁹ Apabila kualitas air bersih semakin menurun, maka akan berdampak pada munculnya krisis air di Australia. Kondisi seperti ini kemudian diperparah dengan tingkat air hujan yang sangat rendah, dan semakin tingginya keperluan air bersih masyarakat Australia dari waktu ke waktu. Maka dari itu, melalui kebijakan WA ini, pemerintah federal membangun kerjasama dengan pemerintah negara bagian *New South Wales*, *Victoria* dan *Southern Australia* untuk merevitalisasi MDB. Tidak hanya ketiga negara bagian tersebut, namun negara bagian lainnya juga dihimbau untuk melakukan pengelolaan dan efisiensi sumber daya air yang baik.

Kebijakan lingkungan Kevin Rudd yang kedua adalah *Carbon Pollution Reduction Scheme* (CPRS) atau secara umum dikenal dengan nama *Emissions Trading Systems* (ETS). CPRS diusulkan oleh Kevin Rudd sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Australia yaitu emisi gas rumah kaca. Selain itu, kebijakan CPRS juga merupakan bentuk kewajiban Australia dalam memenuhi target penurunan emisi GRK sebesar 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 yaitu sebesar 552.6 juta ton karbon dioksida ekuivalen (Mt CO₂-e)²⁰ pasca meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 12 Desember 2007.²¹ Menurut perjanjian tersebut, Australia masuk dalam daftar negara kategori Annex I bersama dengan 42 negara industri lainnya seperti Belgia, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, dll.

GRK yang dimaksud dalam Protokol Kyoto adalah karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oxide (N₂O), hidrofluorkarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC)

¹⁹ "Discover the Basin," Murray Darling Basin Authority, dilihat 5 Januari 2017, <http://www.mdba.gov.au/discover-basin/water>

²⁰ Australian Department of Climate Change, "National Inventory Report 2007 Volume 1," dalam *Australia's Environment: Issues and Trends, Jan 2010*, Australian Bureau of Statistics, modifikasi terakhir 28 Januari 2010, dilihat 12 Januari 2007,

<http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4613.0Chapter50Jan+2010>

²¹ "Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change," United Nations, dilihat 3 Januari 2017, <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

dan sulfur heksafluorida (SF₆). Dari keenam jenis GRK tersebut, CO₂ merupakan emisi terbanyak yang menyumbang kerusakan lingkungan. Mengutip dari data yang dihimpun oleh *Australian Bureau Statistic*, sektor energi dan sektor pertanian merupakan sektor terbesar yang menghasilkan emisi GRK terutama CO₂.²² Lebih lanjut, protokol yang berlangsung pada bulan Desember 1997 tersebut juga mengatur tiga mekanisme kerja yang telah mendapatkan kesepakatan bersama, yaitu²³:

- a. *Joint Implementation* (JI), adalah kerjasama antar negara maju untuk mengurangi emisi GRK yang mereka hasilkan.
- b. *Clean Development Mechanism* (CDM), merupakan mekanisme pembangunan bersih berdasarkan *win-win solution* antara negara maju dengan negara berkembang. Melalui mekanisme ini, negara maju dapat berinvestasi di negara berkembang dalam proyek yang dapat mengurangi emisi GRK. Atas upaya tersebut, negara maju yang bersangkutan akan mendapatkan imbalan berupa *Certificate of Emission Reduction* (CER).
- c. *Emission Trading* (ET), adalah perdagangan emisi antara sesama negara maju.

CPRS sendiri termasuk dalam kategori *Emission Trading* (ET). Melalui CPRS tersebut, pemerintah akan memberikan batasan atau *cap* kepada setiap perusahaan industri yang mengeluarkan emisi polusi karbon setiap tahunnya. Dari *cap* tersebut maka akan muncul *allowances* atau kelebihan emisi yang tidak dipakai. *Allowances* dari emisi suatu industri dapat dijual kepada perusahaan industri lain yang tidak dapat menurunkan emisi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia. Sedangkan bagi perusahaan yang berhasil menurunkan emisi mereka dan mendapatkan kelebihan emisi, maka akan memperoleh keuntungan finansial. Di Australia sendiri, setiap ton emisi karbon yang diperdagangkan sebesar S\$20.²⁴

Menurut situs *World Bank*, *cap* dan *trade* diartikan sebagai berikut²⁵ :

An ETS – sometimes referred to as a cap-and-trade system – caps the total level of greenhouse gas emissions and allows those industries with low emissions to sell their extra allowances to larger emitters. By creating supply and demand for emissions allowances, an ETS establishes a market price for

²² Australian Department of Climate Change, *loc.cit*.

²³ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pemanasan Global* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 12

²⁴ “Carbon pricing schemes climb to \$50bn, despite Australian backtracking.” Carbon Brief Clean on Climate, modifikasi terakhir 27 Mei 2015, dilihat 12 Januari 2017, <https://www.carbonbrief.org/carbon-pricing-schemes-climb-to-50bn-despite-australian-backtracking>

²⁵ “Pricing Carbon,” World Bank, dilihat 12 Januari 2017, <http://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#CarbonPricing>

greenhouse gas emissions. The cap helps ensure that the required emission reductions will take place to keep the emitters (in aggregate) within their pre-allocated carbon budget.

Kegagalan Usulan Kebijakan *Carbon Pollution Reduction Scheme*

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kegagalan usulan kebijakan CPRS, sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kebijakan CPRS merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor serta organisasi. Proses ini melibatkan permainan tawar menawar (*bargaining games*) dalam birokrasi dan arena politik nasional.²⁶ Model pembuatan yang muncul dari proses politik berupa *bargaining games* menurut Graham T. Allison adalah pembuatan keputusan dengan menggunakan Model III atau model politik-birokratik. Menurut Allison proses ini digambarkan sebagai suatu proses dimana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional. Pemain yang dimaksud disini adalah presiden, para menteri, dan aktor-aktor suprapolitik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan melalui proses intelektual.²⁷ Ditambahkan oleh Allison bahwa dalam *bargaining games* tidak ada pemain yang bisa memperoleh semua yang dimiliki. Masing-masing pemain memiliki pamrih, pandangan dan sikap yang berbeda terhadap isu yang diperdebatkan tersebut.

Dalam pembuatan keputusan birokratik-politik, tentu pada akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan publik (*public policy*) yang telah melalui serangkaian tahapan atau proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Penulis dalam hal ini mengambil pengertian kebijakan publik dari William N. Dunn. Menurut Dunn, kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, untuk kemudian diformulasikan di dalam bidang-bidang isu pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan.²⁸ Sebelum kebijakan publik muncul sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, kebijakan tersebut telah melalui suatu prosedur yang dinamakan dengan proses pembuatan kebijakan. Dunn mengartikan proses pembuatan kebijakan sebagai proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik yang saling bergantung: penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan,

²⁶ Graham T. Allison dalam Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), 236

²⁷ Graham T. Allison dalam Mohtar Mas' oed, *ibid.*

²⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 109

dan penilaian kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dapat dilukiskan sebagai siklus aktivitas yang berurutan menurut waktu dan tidak bersifat linear.²⁹

Apabila mengaplikasikan konsep proses pembuatan kebijakan dari Dunn, penulis melihat bahwa kebijakan CPRS hanya melewati dua tahap proses pembuatan yaitu penyusunan agenda dan formulasi kebijakan. Usulan CPRS gagal pada tahap formulasi sehingga tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya atau ke tahap adopsi kebijakan. Uraian di bawah ini menjelaskan mengenai proses pembuatan kebijakan CPRS yang berlandaskan konsep milik Dunn, serta analisis terkait faktor penyebab kegagalan usulan kebijakan CPRS adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Usulan kebijakan diawali dari adanya permasalahan atau isu publik yang dilontarkan aktor-aktor politik, dalam hal ini adalah tingginya tingkat karbon polusi sebagai penyebab terjadinya *global warming* yang dialami oleh Australia, sehingga kemudian pemerintah Australia merespons isu tersebut dengan melihat tingkat urgensi, esensi, maupun alasan dibuatnya sebuah usulan kebijakan tersebut untuk kemudian diprioritaskan dalam agenda publik. Melalui penyusunan agenda, maka dapat dilihat arah dari usulan kebijakan yang dibuat tersebut, apakah berpihak ke rakyat secara keseluruhan, atau hanya menguntungkan golongan tertentu. Adapun latar belakang pembuatan usulan kebijakan CPRS ini didasari oleh dua hal yaitu alasan ideologis dan alasan politis.

Pertama, alasan ideologis dari kebijakan CPRS berkaitan dengan tiga hal yaitu:

- a. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari *platform* atau program ALP khususnya pada *Chapter 9: Combating Climate Change and Building a Sustainable Environment* yang menyatakan³⁰:

Labor recognises there is overwhelming scientific evidence that climate change caused by greenhouse gas emissions is making Australia hotter, the oceans warmer and our major cities and towns drier. Labor believes climate change is the most serious environmental challenge facing the world today.

Selain itu, terdapat 30 poin yang menjadi fokus ALP dalam penyelesaian masalah perubahan iklim serta tingkas gas emisi rumah kaca. Beberapa diantaranya adalah tentang kebijakan *Emissions Trading Scheme (ETS)*,

²⁹ William N. Dunn, *op.cit*, 45

³⁰ Australian Labor: National Platform and Constitution (2007), 136

peratifikasian Protokol Kyoto, dan target pengurangan emisi sebesar 60 persen dibawah tingkat tahun 2000 pada tahun 2050.³¹

Langkah lebih lanjut dari realisasi usulan kebijakan CPRS adalah kemudian pada tanggal 16 Juli 2008, pemerintahan Rudd menerbitkan *Green Paper CPRS* atau dokumen rancangan kebijakan resmi sebagai bukti bahwa CPRS siap untuk didiskusikan ataupun diperdebatkan baik di dalam maupun di luar parlemen. *Green Paper* ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pemerintah ketika akan memperkenalkan sebuah kebijakan baru.

Dari penjelasan diatas dapat digarisbawahi bahwa kebijakan pemerintah di Australia akan bergantung pada partai mayoritas yang menempati kursi Parlemen. Maka, dalam hal ini Partai ALP sebagai pemenang dalam Pemilu dapat menggunakan *platform* partainya sebagai dasar pembuatan kebijakan dalam parlemen.³² *Platform* bagi Australia bukan sekedar berisi serangkaian kebijakan maupun prinsip-prinsip partainya yang hanya dimaknai sebagai “pemanis” belaka, namun benar-benar digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan ataupun *action plan* ketika partai tersebut menjadi pemenang dalam suatu pemilihan umum. Bahkan dalam kenyataannya, para konstituen atau pemilih di daerah pemilihan dapat mengawal kebijakan tersebut melalui *platform* partai. Selain itu, *platform* partai juga berfungsi sebagai penarik dukungan masyarakat saat kampanye pemilihan umum. Saat kampanye dilaksanakan, partai tidak hanya membagikan atribut-atributnya kepada masyarakat, namun juga mensosialisasikan *platform* partai yang berisi tentang pemecahan dari masalah di lingkungan masyarakat.

- b. Menurut perhitungan Protokol Kyoto, total gas emisi rumah kaca bersih Australia pada tahun 2006 adalah sebesar 576 MtCO₂-e. Jumlah emisi ini meningkat 4.2% dibandingkan level tahun 1990, yaitu 552.6 MtCO₂-e.³³ Fakta dari sumber lain menyebutkan jika emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh sektor industri di Australia berada di tingkat ketiga tertinggi dari negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), sebuah organisasi *developed country* yang mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. Hal ini dikarenakan pada tahun 2005, emisi dari sektor energi Australia berjumlah

³¹ Australian Labor: National Platform and Constitution (2007), *op.cit.*, 137

³² Dr. Dafri Agussalim, wawancara oleh Ayudya Aroem Brilliane, 5 Januari 2017.

³³ Departement of Climate Change: Australia's National Greenhouse Accounts, *loc.cit.*

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

sekitar 67% lebih tinggi daripada rata-rata anggota OECD, dan lebih dari 4 kali lipat rata-rata dunia.³⁴

Berangkat dari fakta mengenai kondisi emisi Australia, dan bila dibandingkan dengan negara lain khususnya anggota OECD maka dapat disimpulkan bahwa memang perlu untuk membuat suatu langkah nyata dalam menghadapi ancaman dari perubahan iklim dan mewujudkan Australia menjadi negara yang hijau. Maka dari itu, melalui CPRS diharapkan dapat menekan laju emisi gas rumah kaca industri di Australia karena jika besaran CO₂ dari industri tidak dibatasi emisinya, maka dapat membahayakan kehidupan masyarakat Australia di masa mendatang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Minister of Climate Change and Water, Senator The Hon Penny Wong dalam pidatonya di Melbourne tanggal 9 Februari 2008³⁵:

“The signs that the Australian climate is changing due to human influences are now apparent. Last month, the Bureau of Meteorology reported that 2007 was the sixth warmest on record, and that 16 of the last 18 years have been warmer than the long term average in Australia. Looking to the future, CSIRO projects that temperatures will rise another 1 to 5 degrees by 2070. In those circumstances, Australia’s most populated regions face a permanent shortage of water.

Opportunity or threat, this is a challenge we need to solve together. We must look to each other, and we must ask of ourselves whether we have done enough.

This applies equally to government. Responsible leadership means all of us need to have a seat at the table, all of us need to have confidence in our course. People will need to understand the changes going on around them – both in terms of the climate, and the policies we implement.”

- c. Bila sedikit melihat ke belakang saat kampanye pemilu nasional 2007 berlangsung, Kevin Rudd telah berjanji akan meratifikasi Protokol Kyoto dan berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon Australia jika berhasil menjabat sebagai perdana menteri. Janji politik Kevin Rudd ini kemudian dibuktikan langsung yaitu pasca 9 hari setelah pelantikan resminya

³⁴ “Australia’s Emissions in A Global Context,” The Garnaut Climate Change Review, dilihat 25 Januari 2017, http://www.garnautreview.org.au/pdf/Garnaut_Chapter7.pdf, 154

³⁵ “Climate Change: A Responsibility Agenda,” Australian Embassy France, modifikasi terakhir 6 Februari 2008, dilihat 25 Februari 2017, <http://france.embassy.gov.au/pari/SpeechCC6feb.html>

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

menjadi perdana menteri Australia, Rudd meratifikasi Protokol Kyoto pada 12 Desember 2007.

Dalam Protokol Kyoto tersebut, Australia diklasifikasikan sebagai negara Annex I yang merupakan *industrialized (developed) countries*. Menurut peraturan Protokol Kyoto, negara Annex I berkewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka sebesar rata-rata 5% dari tingkat emisi tahun acuan dasar yaitu tahun 1990.³⁶ Setelah meratifikasi Protokol Kyoto tersebut, maka Australia berkewajiban mengadopsi peraturan tersebut ke dalam hukum nasional Australia.

Kedua, alasan politis dari munculnya usulan kebijakan CPRS adalah sebagai hasil negosiasi politik terhadap kaum Partai Hijau atau *the Greens*, sebagai partai afiliasi dari ALP. Negosiasi politik yang terjadi antara *the Greens* dengan ALP tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya keadaan ekonomi Australia saat berada di bawah kepemimpinan John Howard dari partai koalisi Liberal Nasional Australia selama 11 tahun. Partai Liberal Nasional Australia memang selalu diasosiasikan dengan kemampuan mengatur perekonomian dengan baik. Dengan kata lain, di bawah Partai Liberal Nasional, kondisi ekonomi Australia selalu bagus.³⁷

Namun sangat disayangkan, meningkatnya kondisi ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan usaha untuk melestarikan lingkungan hidup sekitar. Eksploitasi sumber daya alam yang telah melebihi nilai kritisnya masih terus terjadi sehingga mengakibatkan berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, maupun kebakaran hutan. Kegiatan perindustrian nasional Australia pertumbuhannya masih sangat masif namun tidak ada peraturan ketat dari pemerintah mengenai gas emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan industri, hingga pada akhirnya diketahui bahwa gas CO₂ dari perusahaan tersebut jumlahnya tidak sedikit dan merupakan salah satu penyumbang penyebab pemanasan global.³⁸ Kondisi ini diperparah dengan penolakan dari John Howard untuk meratifikasi Protokol Kyoto dan masih lemahnya peraturan tentang pembatasan gas emisi rumah kaca dari pemerintah. Lebih lanjut, saat jabatan perdana menteri dipegang oleh Kevin Rudd, perekonomian Australia memang melambung, namun sektor pertambangan yang menyumbang 10% dari GDP Australia (perhitungan tahun 2007-2008),³⁹ terutama dari perusahaan ternama seperti

³⁶ "The Protocol Kyoto," United Nations Framework Convention on Climate Change, dilihat 25 Januari 2017,

https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/fact_sheet_the_kyoto_protocol.pdf, 1

³⁷ Dr. Dafri Agussalim, wawancara oleh Ayudya Aroem Brilliane, 5 Januari 2017.

³⁸ Departement of Climate Change: Australia's National Greenhouse Accounts, *op.cit*, 3

³⁹ "Economic Contribution: Mining Industry," Australian Bureau of Statistics, dilihat 26 Januari 2007, <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/0F2FAE2AE39180F0CA25773700169CC3?opendocument>

BHP Billiton, Rio Tinto, Xtrata, Shell, Chevron dan Woodside Petroleum memiliki isu lingkungan terkait pencemaran sumber air Murray Darling Basin.

Munculnya dampak negatif dibalik pertumbuhan ekonomi Australia yang meningkat atau relatif stabil dari tahun ke tahun, mendorong *the Greens* sebagai partai afiliasi mengajukan pernyataan keberatan terhadap ALP. *The Greens* menganggap jika Kevin Rudd masih terus memperhatikan pertumbuhan ekonomi tanpa memedulikan isu lingkungan hidup, maka tindakan Kevin Rudd tersebut tidak sesuai dengan *platform* partainya sendiri khususnya pada *Chapter 9: Combating Climate Change and Building a Sustainable Environment*, dan dipandang telah melanggar janji politiknya pada saat kampanye pemilu nasional 2007 tentang perbaikan lingkungan hidup.

Sikap keberatan dari *the Greens* ini direspon positif oleh ALP dengan memasukkan isu lingkungan, terutama permasalahan karbon sebagai agenda kebijakan pemerintah Kevin Rudd. Penulis melihat adanya alasan politis dibalik pembuatan usulan kebijakan CPRS, yaitu karena ALP yang saat itu dipimpin oleh Kevin Rudd tidak ingin kehilangan dukungan dari *the Greens* apabila pada pemilu federal selanjutnya tidak menghasilkan partai mayoritas sehingga terjadi kondisi *hung parliament*.⁴⁰ *The Greens* memang merupakan kelompok afiliasi dari ALP sejak tahun 1984 dan kedua partai tersebut sudah banyak menghasilkan kerjasama-kerjasama di bidang lingkungan seperti misalnya upaya pelestarian Great Barrier Reef.⁴¹ Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa CPRS merupakan hasil negosiasi politik antara ALP dengan *the Greens* ---- ALP memandang jika isu lingkungan mempunyai potensi besar untuk mendapatkan dukungan suara dari kaum *the Greens*. ALP kemudian berkomitmen untuk membuat usulan CPRS karena sesuai dengan salah satu tujuan kebijakan dari *the Greens* yaitu mencapai emisi gas rumah kaca Australia bersih negatif atau bersih nol dalam satu generasi.⁴² Sebagai imbalannya, *the Greens* memberikan dukungan kepada ALP jika pada pemilu federal terjadi kondisi *hung parliament* karena ALP telah mengupayakan ideologi *the Greens* ke dalam dinamika politik Australia melalui CPRS yang masuk sebagai agenda kebijakan. Dukungan dari *the Greens* ini terbukti saat pemilu federal tahun 2010

⁴⁰ *Hung parliament* adalah kondisi dimana partai politik yang mengikuti pemilu federal tidak menghasilkan partai mayoritas yaitu 50%+1. Partai politik diwajibkan untuk mendapatkan minimal 76 kursi dari 150 kursi yang tersedia pada *House of Representative* (HoR) untuk dapat membentuk pemerintahan. Australia mengalami 2 kali *hung parliament* yaitu saat pemilu federal tahun 1940 dan 2010.

⁴¹ Dr. Dafri Agussalim, wawancara oleh Ayudya Aroem Brilliane, 5 Januari 2017.

⁴² "The Greens Principles and Aims: Climate Change and Energy," The Greens, dilihat 28 Januari 2017, <http://greens.org.au/policies/climate-change-energy>

ketika terjadi *hung parliament* hingga kemudian pemilu tersebut dapat dimenangkan oleh Julia Gillard.

2. Penyusunan Agenda

Setelah usulan kebijakan CPRS menjadi agenda kebijakan (kemudian disebut dengan CPRS Bill)⁴³, selanjutnya masuk dalam tahap formulasi untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh para pembuat kebijakan. Namun ketika kebijakan tersebut didiskusikan secara mendalam oleh parlemen, CPRS justru menjadi perdebatan antara pihak pro lingkungan (dalam hal ini adalah ALP serta afiliasinya, *the Greens*) dengan pihak pro ekonomi (mayoritas adalah dari Partai Koalisi Liberal Nasional) hingga pada hasil akhirnya CPRS gagal untuk mendapatkan suara dari *Senate* dan harus ditangguhkan untuk beberapa waktu. Perdebatan ini dapat dilihat melalui HANSARD atau laporan dari proses parlemen Australia dan komite-komitennya dalam tahap formulasi suatu undang-undang. Adapun laporan parlemen yang tercatat adalah dari *chamber Senate, House of Representatives* (HoR), dan semua komite parlemen.

Pada tahap formulasi, usulan kebijakan CPRS atau CPRS Bill pertama kali masuk ke *lower house* atau HoR. Dalam HoR, sikap ALP yang mendukung disahkannya usulan kebijakan CPRS ini ditunjukkan dengan pidato yang disampaikan oleh Ms. Janelle Saffin⁴⁴:

“I speak in support of the Carbon Pollution Reduction Scheme Bill and cognate bills, bills that are necessary to put in place a legal and regulatory framework around the government’s Carbon Pollution Reduction Scheme—a scheme that in my analysis is based on three key elements. The first one is that big polluters pay, and we understand that. The second one is that low- and middle-income families right across Australia will be looked after by the Carbon Pollution Reduction Scheme fund and by having the big polluters pay. The third key element is that a limit will be put on harmful greenhouse gas emissions.”

ALP dan partai afiliasinya dalam *lower house* mengangkat isu pemanasan global sebagai hal yang harus segera diatasi dengan cara pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perusahaan industri di Australia. Namun pernyataan tersebut terus disanggah oleh partai oposisi yaitu koalisi Liberal Nasional yang menganggag bahwa jika CPRS diimplementasikan, maka akan berakibat buruk pada

⁴³ *Bill* merupakan nama untuk sebuah keputusan sebelum keputusan tersebut disahkan menjadi undang-undang.

⁴⁴ “Carbon Pollution Reduction Scheme Bill Official Hansard,” Commonwealth of Australia Parliamentary Speech House of Representatives, 4 February 2009, dilihat 20 Februari 2017, 450

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

ekonomi Australia. Hal demikian disampaikan oleh Mr. Malcolm Turnbull yang juga merupakan pemimpin dari partai oposisi⁴⁵:

“The Carbon Pollution Reduction Scheme Bill 2009 and its accompanying bills represent the centerpiece of the government’s efforts. So it claims, to reduce carbon dioxide emissions in Australia. The legislation is distinguished by the fact it has almost no supporters. The business community have almost unanimously complained about its job-destroying provisions; the environmentalists, on the other hand, have complained that it does not go far enough and is not effective in reducing emissions.

We can ask the question: is that a price worth paying to save the planet? The answer is that it is not, because the only consequence of Xstrata or any other large coalminer in Australia being unable to mine coal profitably in this country is that they or other companies will mine more coal in other nations. In other words, we will mine less coal in Australia and there will be more coal mined in Indonesia or Colombia or South Africa---fewer jobs, less income, less tax revenue, less prosperity in Australia; more jobs, more income, more prosperity and the same, if not more, emissions in another country.”

Meskipun mendapat banyak protes terutama dari partai oposisi, namun CPRS Bill berhasil lolos dalam *lower house* dan kemudian dikirimkan ke *upper house* atau tingkat *Senate*. Sebagian banyak usulan kebijakan Australia untuk mengesahkannya menjadi sebuah undang-undang harus melewati *lower house* terlebih dahulu. Baru setelah mendapat suara dukungan mayoritas *lower house* dan diloloskan, usulan kebijakan tersebut dikirim ke *upper house*. Namun tidak jarang ada beberapa usulan kebijakan yang dimulai dari *upper house* dahulu, kemudian *lower house*.

Dalam tingkat *Senate* ini, tuduhan miring tentang Kevin Rudd dan dampak negatif jika CPRS berhasil diimplementasikan semakin gencar dikeluarkan dari pihak oposisi. Kritik yang paling menonjol adalah bahwa CPRS ini akan berpengaruh terhadap menurunnya industri Australia yang kemudian juga berdampak pada penurunan ekonomi. Hingga pada akhirnya CPRS Bill gagal mendapatkan suara dari *Senate* untuk diloloskan menjadi undang-undang. Kegagalan dari CPRS Bill tersebut dapat dilihat menggunakan model pembuatan keputusan birokratik politik milik Graham T. Allison dimana para pemain, dalam hal ini adalah anggota parlemen telah menimbang *cost* dan *benefit* dari CPRS Bill. Negosiasi antara pemerintahan Rudd dengan oposisi telah berlangsung secara *intense*, namun *Senate* masih tetap menolak CPRS Bill bahkan *vote down* terjadi hingga 2 kali yaitu pada sidang *Senate* bulan

⁴⁵ “Carbon Pollution Reduction Scheme Bill Official Hansard,” Commonwealth of Australia Parliamentary Speech House of Representatives, 2 June 2009, dilihat 20 Februari 2017, 5291

Agustus dan Desember.⁴⁶ Seperti yang telah diketahui, untuk meloloskan sebuah *bill* menjadi undang-undang resmi maka harus melewati 2 *houses* yaitu HoR dan *Senate*.

Melihat uraian diatas, maka isu ekonomi adalah faktor terbesar penyebab kegagalan dari CPRS Bill. CPRS merupakan usaha dari pemerintah Australia untuk memberlakukan pembatasan emisi karbon suatu perusahaan. Emisi karbon ini berkaitan erat dengan industri, seperti pertambangan dan energi yang menghasilkan bijih besi, batubara, aluminium, serta *liquid natural gas* (LNG). Padahal faktanya, produk dari industri-industri tersebut berkontribusi besar menyumbang keuntungan negara di sektor ekspor. Produk tersebut juga dijual di pasar domestik namun masih harus bersaing dengan komoditas impor lain.⁴⁷ Seperti contohnya, sebuah perusahaan kilang minyak di Australia memproduksi bensin, diesel, dan bahan bakar penerbangan sekitar 34.000 ML per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik bagi komoditas tersebut jauh lebih banyak dari total jumlah produksi (43.000 setiap tahun). Maka dari itu, 21 persen sisanya harus impor untuk memenuhi permintaan pasar. Persaingan dengan produk impor menjadi kendala perusahaan kilang minyak Australia untuk menerima harga dunia.⁴⁸

Produksi sejumlah komoditas domestik tersebut menghasilkan gas emisi rumah kaca (GRK) yang cukup besar, seperti *fugitive emissions* atau “emisi buronan”⁴⁹ dari pertambangan batu bara dan proses ekstraksi minyak. Banyak juga dari proses produksi suatu perusahaan tersebut yang memerlukan energi tambahan, misalnya proses pemadatan gas alam untuk menghasilkan LNG. Apabila CPRS diimplementasikan, maka akan mengakibatkan biaya industri semakin meningkat dan proses yang lebih panjang dikarenakan⁵⁰:

- a. Perusahaan tersebut akan memerlukan *acquire* dan *acquit permits* (disebut dengan *Australian emissions unit*) untuk menutupi GRK mereka; dan
- b. Perusahaan tersebut akan menghadapi kenaikan harga terutama bila dalam prosesnya mengharuskan adanya energi tambahan.

Biaya yang meningkat ini menempatkan industri Australia pada kerugian, apalagi ditambah dengan komoditas pesaing dari luar negeri yang tidak menghadapi kebijakan CPRS seperti Australia. Industri di Australia mempunyai peranan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional, dan apabila CPRS berhasil diterapkan maka akan memiliki *multiple effect* yang luas. Jika produk industri domestik menurun karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah, sedangkan perusahaan masih harus mengeluarkan biaya untuk membeli kelebihan

⁴⁶ Adeline Dontenville, “Australian Senate rejects CPRS... again,” *Climatico Analysis*, 3 Desember, dilihat 21 Februari 2017, <http://www.climaticoanalysis.org/post/australian-senate-rejects-cprs%E2%80%A6again/>

⁴⁷ Grant Anderson, “Carbon Pollution Reduction Scheme: Impact on The Mining and Energy Industries,” *UNSW Law Journal Volume 31 (3)*, dilihat 21 Februari 2017, 932

⁴⁸ Calted Australia Limited dalam Grant Anderson, *ibid*.

⁴⁹ Emisi gas atau uap dari peralatan bertekanan tinggi karena disebabkan oleh kebocoran

⁵⁰ Calted Australia Limited dalam Grant Anderson, *loc.cit*

emisi dari perusahaan lain, maka dikhawatirkan akan banyak perusahaan industri domestik yang gulung tikar. Perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan jutaan pekerja di sektor industri terancam di PHK bahkan menganggur dan pada akhirnya menambah daftar kemiskinan masyarakat Australia. Kesejahteraan masyarakat kemudian juga menurun. Dampak panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Terjadinya hambatan ekonomi, terutama industri seperti uraian diatas dibawa oleh partai oposisi sehingga kemudian mereka menentang kebijakan lingkungan semacam CPRS. Walaupun ALP merupakan partai yang menjalankan pemerintahan saat itu, namun bukan berarti semua kebijakan yang diusulkan oleh ALP mendapatkan banyak suara dalam parlemen untuk kemudian diloloskan. Hal ini dikarenakan tidak semua mendukung ALP. Tetap ada anggota parlemen yang cenderung dengan oposisi, yaitu Partai Liberal. Terutama buruh yang relatif *non-blue collar* atau bukan pekerja kasar.⁵¹ Selain itu, CPRS merupakan kebijakan *boomerang* bagi ALP karena kaum buruh yang adalah kaum yang ingin ALP lindungi justru terkena dampak panjang dari CPRS. Kaum buruh banyak yang di PHK, menganggur, kesejahteraan hidupnya turun, tidak ada penghasilan sehingga menjadi miskin karena kebijakan yang dibuat oleh ALP sendiri.

Dampak Gagalnya CPRS terhadap Kestabilan Politik Australia pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd

Meskipun tanggapan publik terhadap kegagalan dari CPRS Bill tidak terlalu masif, namun kegagalan tersebut tidak dipungkiri berdampak pada stabilitas politik Australia pada tahun 2010 yaitu terjadinya pergantian kepemimpinan yang ditandai dengan turunnya Kevin Rudd sebagai perdana menteri Australia dan kemudian digantikan oleh Julia Gillard. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah buku yang berjudul *The Rudd Government: Australian Commonwealth Administration 2007 – 2010*⁵²:

“The Rudd government’s first term in office was tainted by its public failings on climate policy. In the lead-up to the 2007 federal election, Kevin Rudd presented Labor as the party of climate reform, the party that was willing to take climate change seriously and make the bold decisions needed to set the Australian economy on a new course. Expectations were raised to unprecedented heights and there were hopes that Australia might provide an example of an advanced, emissions-intensive economy that was willing to place global interests above short-term national ones. These hopes dissipated over the course of the next three years, culminating in the government’s

⁵¹ Dr. Dafri Agussalim, wawancara oleh Ayudya Aroem Brilliane, 5 Januari 2017.

⁵² Andrew Macintosh, Deb Wilkinson, dan Richard Denniss, “Climate Change,” dalam *The Rudd Government: Australian Commonwealth Administration 2007 – 2010*, ed. Chris Aulich dan Mark Evans (Canberra: Australian National University Press, 2010), 199.

decision in April 2010 to shelve its plans to introduce an emissions trading scheme (ETS).

The abandonment of the ETS sparked a chain of events that ultimately led to Rudd's removal as Prime Minister."

Kevin Rudd pada awal pemerintahannya mengatakan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan moral terbesar di jaman kita (*the greatest moral challenge of our time*), namun pada akhirnya Rudd sendiri tidak dapat mempertahankan kebijakan CPRS di hadapan 76 anggota *Senate* sehingga CPRS gagal untuk diimplementasikan. Sejak saat itu, dukungan publik terhadap Kevin Rudd jatuh secara dramatis karena masyarakat tidak lagi mampu menempatkan kepercayaan pada kepemimpinan Rudd.⁵³ Lebih lanjut, Rudd dianggap telah mengingkari janji kampanyenya pada tahun 2007 yaitu menanggulangi isu pemanasan global yang digambarkannya sebagai tantangan terbesar umat manusia.

Pernyataan diatas searah dengan pendapat dari akademis, dalam hal ini adalah wawancara dengan Drs. Dafri Agussalim, M.A., dan hasil survey oleh penulis. Bapak Dafri menyatakan bahwa kegagalan kebijakan yang diusulkan Kevin Rudd bisa jadi berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Buruh, meskipun bukan masyarakat secara umum dan hanya kelompok tertentu saja.⁵⁴ Kelompok tertentu yang dimaksud adalah pecinta lingkungan hidup. Sedangkan dalam survey, 10 dari 15 responden menyetujui bahwa kegagalan usulan kebijakan CPRS berpengaruh terhadap turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Australia dibawah kepemimpinan Kevin Rudd. Sisanya, yaitu 4 responden tidak menyetujui, dan 1 responden tidak menjawab.⁵⁵

Kegagalan dari CPRS Bill tersebut tidak hanya berdampak pada turunnya Kevin Rudd dari jabatan perdana menteri, namun juga berdampak positif terhadap sikap Kevin Rudd yang kemudian lebih berfokus kepada kebijakan lainnya, yaitu salah satunya adalah reformasi kesehatan atau *health reform*.⁵⁶ Kevin Rudd menyadari bahwa tidak seharusnya ia menyerah kepada CPRS Bill yang kemudian berujung pada kegagalan implementasinya, namun masih terdapat kebijakan lain yang harus dilaksanakan untuk membangun Australia. Sebelumnya, ketika CPRS Bill masih menuai perdebatan di parlemen, Kevin Rudd juga berjuang agar parlemen dapat meloloskan kebijakan *health reform*. Kebijakan *health reform* tersebut kemudian mendapat persetujuan dari parlemen dan pada bulan Maret 2010 telah resmi keluar sebagai kebijakan dengan nama *A National Health and Hospital's network for Australia's Future*." Kebijakan *health reform* yang dibuat oleh Kevin

⁵³ "Why Labor ditched Kevin Rudd," *The Guardian*, modifikasi terakhir 24 Juni 2010, dilihat 27 Februari 2017, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/24/kevin-rudd-australia-labor>

⁵⁴ Dr. Dafri Agussalim, wawancara oleh Ayudya Aroem Brilliane, 5 Januari 2017.

⁵⁵ Survey oleh penulis, "Australia Political Issues Survey (Kevin Rudd Regime 2007-2010)."

⁵⁶ Philip Chubb, "The Day The Rudd Government Lost Its Way On Climate Change," *The Age*, dilihat 27 Februari 2017, <http://www.theage.com.au/insight/the-day-the-rudd-government-lost-its-way-on-climate-change-20140509-zr7fm.html>

Rudd telah disetujui oleh seluruh negara bagian di Australia. Adapun beberapa poin dalam kebijakan tersebut adalah⁵⁷:

- a. Pemerintah federal akan menjadi penyandang dana mayoritas pelayanan rumah sakit umum di Australia dengan mendanai 60% dari biaya yang telah disepakati oleh pihak rumah sakit dan pasien.
- b. Seiring berjalannya waktu, pemerintah federal akan memiliki dana yang mengutamakan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah lanjut usia.
- c. Setiap rumah sakit akan diberikan otonomi khusus sehingga dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Diharapkan dengan adanya otonomi ini, pelayanan rumah sakit tersebut akan menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan responsif.

Apabila melihat pencapaian Kevin Rudd pada masa pemerintahannya, Rudd sebenarnya cukup kapabel dalam hal kesejahteraan masyarakat. Rudd banyak menginvestasikan dana-dana negara untuk kepentingan yang lebih sosialis seperti misalnya subsidi kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan, dan peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas.⁵⁸ Selain itu, Kevin Rudd juga menarik simpati masyarakat dengan mengambil tindakan permohonan maaf kepada kaum Aborigin atas kejadian Lost Generation, serta meratifikasi Protokol Kyoto pada awal Rudd menjabat sebagai perdana menteri. Namun, popularitas Kevin Rudd mulai menurun pada bulan Desember 2009 ketika usulan kebijakan CPRS Bill mendapat penolakan dari oposisi, hingga akhirnya CPRS harus ditunda implementasinya. Menurut polling yang bersumber dari parlemen, popularitas Kevin Rudd menurun drastis dan kini hanya memiliki dukungan sebesar 30% karena dianggap tidak berhasil dalam mengatasi isu pemanasan global yang merupakan janji Kevin Rudd pada masa kampanye tahun 2007.⁵⁹ Kegagalan Kevin Rudd dalam meloloskan CPRS Bill mengakibatkan perusahaan industri yang menjadi penyumbang polusi di Australia terhindar dari kewajiban membayar kelebihan emisi. Sementara itu, terdapat juga polling yang diadakan oleh media berita *Sydney Morning Herald* yang menyatakan bahwa Kevin Rudd telah kehilangan suara dari pemilihnya karena kebijakan pajak pertambangan yang diusulkan Kevin Rudd gagal untuk memenangkan dukungan parlemen. Berikut adalah ulasan berita tersebut secara lengkap⁶⁰:

⁵⁷ "Will The Buck Stop With Rudd On Fixing The Hospital System," *The Conversation*, dilihat 27 Februari 2017, <http://theconversation.com/will-the-buck-stop-with-rudd-on-fixing-the-hospital-system-15571>

⁵⁸ Dr. Dafri Agussalim, wawancara oleh Ayudya Aroem Brilliane, 5 Januari 2017.

⁵⁹ "Perdana Menteri Kevin Rudd Mengundurkan Diri," *Liputan 6*, modifikasi terakhir 24 Juni 2010, dilihat 2 Maret 2017, <http://global.liputan6.com/read/283055/perdana-menteri-kevin-rudd-mengundurkan-diri>

⁶⁰ Phillip Coorey, "Rudd In Freefall: Voters Lose Faith," *Sydney Morning Herald*, modifikasi terakhir 10 Mei 2010, dilihat 2 Maret 2017, <http://www.smh.com.au/national/rudd-in-freefall-voters-lose-faith-20100509-ulqh.html>

“Support for Kevin Rudd has plunged to record lows and his proposed mining tax has failed to win popular backing, putting more pressure on the federal budget tomorrow to lift the government out of an entrenched election-year slump. The findings are contained in a Herald/Nielsen poll which indicates that if an election were held now, Labor would lose. Since the previous poll a month ago, Mr Rudd's approval rating has nosedived 14 percentage points to 45 per cent, while his disapproval rating has skyrocketed 13 points to 49 per cent.

The loss of personal support is the most dramatic for a prime minister in a decade. It marks the first time Mr Rudd, as either opposition leader or prime minister, has had a disapproval rating higher than his approval rating.”

Puncak dari ketidakpuasan akan pemerintahan Kevin Rudd kemudian ditandai dengan keputusan dalam kaukus ALP yang mencopot jabatan Kevin Rudd sebagai perdana menteri pada tanggal 24 Juni 2010. Di tanggal yang sama, ALP menempatkan Julia Gillard untuk menggantikan posisi Kevin Rudd tersebut. Pergantian kepemimpinan ini sempat mendapat sorotan tajam dari beberapa politikus. Seperti dikutip dari pernyataan Pip Hinman, seorang anggota partai *Australian Socialist Alliance*, menyatakan bahwa Gillard merupakan politikus konservatif yang sama seperti anggota ALP lainnya. Pernyataan Gillard terhadap persoalan pengungsi, kebijakan luar negeri, dan penarikan pajak dari perusahaan tambang kerap kali tidak tegas. Pip Hinman juga berpendapat bahwa kenaikan Gillard sebagai perdana menteri Australia merupakan upaya putus asa kaukus dan cara ALP untuk menaikkan citra partainya setelah pemerintahan Rudd yang membuat kecewa internal ALP.⁶¹

Adapun CPRS Bill yang diusulkan pada jaman Kevin Rudd, diterapkan oleh Julia Gillard meskipun dengan nama yang berbeda yaitu kebijakan *Carbon Pricing* atau *Carbon Tax* sebagai upaya Gillard untuk mengatasi permasalahan emisi karbon di Australia. Serupa dengan kebijakan CPRS, *Carbon Pricing* juga mendapatkan perlawanan tajam dari oposisi yang saat itu dipimpin oleh Tony Abbott. Namun akhirnya, *Senate* meloloskan undang-undang *carbon pricing* tersebut pada 2011 dan mulai diimplementasikan tahun 2012.⁶² Lebih lanjut, undang-undang *Carbon Pricing* era Gillard terus menuai kontra terutama dari kelompok industri, hingga kemudian tahun 2013 saat Tony Abbott menjadi perdana menteri ke-28, ia melakukan penghapusan terhadap undang-undang tersebut.

Kesimpulan

Pada masa pemerintahan Kevin Rudd tahun 2007-2010 ini, pemerintah Australia mengeluarkan usulan kebijakan *Carbon Pollution Reduction Scheme*

⁶¹ Peter Boyle, “Julia Gillard: Change For The Better?,” *Green Left Weekly*, modifikasi terakhir 26 June 2010, dilihat 2 Maret 2017, <https://www.greenleft.org.au/content/julia-gillard-change-better>

⁶² “Australia Passes Controversial Carbon Pollution Tax,” *Macau Daily Times*, modifikasi terakhir 9 November 2011, dilihat 2 Maret 2017, <http://macaudailytimes.com.mo/archive-2009-2014/asia-pacific/31255-australia-passes-controversial-carbon-pollution-tax.html>

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

(CPRS) yang merupakan skema perdagangan emisi *cap and trade*. *Cap and trade* sendiri adalah pemberian batasan dari pemerintah atau *cap* kepada setiap perusahaan industri yang mengeluarkan emisi polusi karbon setiap tahunnya. Dari *cap* tersebut maka akan muncul *allowances* atau kelebihan emisi yang tidak dipakai. *Allowances* dari emisi suatu industri dapat dijual kepada perusahaan industri lain yang tidak dapat menurunkan emisi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia. Sedangkan bagi perusahaan yang berhasil menurunkan emisi mereka dan mendapatkan kelebihan emisi, maka akan memperoleh keuntungan finansial. Adapun tujuan dari kebijakan CPRS adalah: 1) untuk membantu Australia memenuhi target pengurangan emisi dengan cara yang fleksibel dan hemat biaya, 2) mendukung respon global terhadap perubahan iklim, 3) memberikan pendampingan transisi atau *transitional assistance* terhadap sektor yang akan paling berpengaruh terhadap implementasi CPRS yaitu sektor industri.

Menurut hasil analisis yang berdasarkan pada proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn, adanya pembuatan kebijakan CPRS dimulai dari tahap penyusunan agenda. Adapun penyusunan usulan kebijakan CPRS didasari pada dua alasan, yakni alasan ideologis dan alasan politis. Alasan ideologis sendiri meliputi tiga hal: 1) implementasi dari *platform* atau program ALP tahun 2007 khususnya pada *Chapter 9: Combating Climate Change and Building a Sustainable Environment*, 2) melihat pada kondisi emisi karbon Australia, dan 3) bentuk kewajiban Kevin Rudd setelah meratifikasi Protokol Kyoto yaitu mengadopsi ketentuan-ketentuan yang diatur Protokol Kyoto tersebut ke dalam hukum nasional, dalam hal ini adalah melalui usulan kebijakan CPRS. Sedangkan alasan politisnya adalah bahwa kebijakan CPRS merupakan hasil negosiasi politik terhadap kaum Partai Hijau atau *the Greens*, sebagai partai afiliasi dari ALP.

Setelah usulan kebijakan CPRS memasuki tahap penyusunan agenda, usulan kebijakan tersebut kemudian berlanjut pada tahap formulasi kebijakan. Di tahap formulasi inilah CPRS mengalami kegagalan bahkan hingga dua kali karena tidak mendapatkan suara yang cukup dari *Senate* untuk kemudian diloloskan sebagai sebuah kebijakan. Kegagalan yang dialami oleh CPRS disebabkan oleh adanya isu ekonomi. CPRS ini juga dapat dikatakan merupakan kebijakan *boomerang* bagi ALP karena kaum buruh yang adalah kaum yang ingin ALP lindungi justru malah terkena dampak panjang dari CPRS. Kaum buruh sendiri akan banyak yang terkena PHK, menganggur, kesejahteraan hidupnya turun, dan tidak ada penghasilan sehingga menjadi miskin karena kebijakan yang dibuat oleh ALP.

Daftar Pustaka

<Buku>

Allison, Graham T. dalam Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

- Australian Labor: National Platform and Constitution (2007)
- Australian Labor: National Platform and Constitution (2007).
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Hartcher, Peter. *To The Bitter End: the Dramatic Story behind the Fall of John Howard and the Rise of Kevin Rudd*. New South Wales: Allen & Unwin, 2009.
- Macintosh, Andrew, Deb Wilkinson, dan Richard Denniss. "Climate Change." Dalam *The Rudd Government: Australian Commonwealth Administration 2007 – 2010*. Editor Chris Aulich dan Mark Evans. Canberra: Australian National University Press, 2010.
- Wardhana, Wisnu Arya. *Dampak Pemanasan Global*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- <Artikel Jurnal>**
- Anderson, Grant. "Carbon Pollution Reduction Scheme: Impact on The Mining and Energy Industries." *UNSW Law Journal Volume 31 (3)*. Dilihat 21 Februari 2017
- Departement of Climate Change: Australia's National Greenhouse Accounts. "National Greenhouse Gas Inventory 2006 Accounting for the Kyoto Target." Dilihat 25 Januari 2017. http://www.egovernment.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/57133/inventory2006.pdf
- The Garnaut Climate Change Review. "Australia's Emissions in A Global Context." Dilihat 25 Januari 2017, http://www.garnautreview.org.au/pdf/Garnaut_Chapter7.pdf
- Triwahyuni, Dewi. "Sustainable Development: Paradigma Baru Metode Pembangunan Ekonomi." *UNIKOM*. Dilihat 13 November 2016. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=38415>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. "Kyoto Protocol Reference Manual." dilihat 1 Juni 2016. https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
- United Nations Framework Convention on Climate Change. "The Protocol Kyoto." Dilihat 25 Januari 2017. https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/fact_sheet_the_kyoto_protocol.pdf

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

United Nations. "Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change." Dilihat 3 Januari 2017.
<https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>

<Internet>

ABC Elections. "Australia Votes 2007." Modifikasi terakhir 21 Desember 2007. Dilihat 20 November 2016, <http://www.abc.net.au/elections/federal/2007/>

Aritonang, Abdi Sapta Gelora. "Kajian Isu Pemanasan Global, Sebuah Kritik Terhadap Studi Lingkungan Hidup Dalam Paradigma Hubungan Internasional." *The Global Review*. 20 Juni 2012. Dilihat 15 Mei 2016.
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#.VzmlfyG4Z_k

Australian Bureau of Statistics. "Economic Contribution: Mining Industry." Dilihat 26 Januari 2007.
<http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/0F2FAE2AE39180F0CA25773700169CC3?opendocument>

Australian Department of Climate Change. "National Inventory Report 2007 Volume 1." Dalam *Australia's Environment: Issues and Trends, Jan 2010*. Australian Bureau of Statistics. modifikasi terakhir 28 Januari 2010. dilihat 12 Januari 2007.
<http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4613.0Chapter50Jan+2010>

Australian Embassy France. "Climate Change: A Responsibility Agenda." Modifikasi terakhir 6 Februari 2008. Dilihat 25 Februari 2017.
<http://france.embassy.gov.au/pari/SpeechCC6feb.html>

Australian Federal. "Kevin Rudd Election Speech Transcript." 14 November 2007. Dilihat 13 November 2016.
<http://electionspeeches.moadoph.gov.au/speeches/2007-kevin-rudd>

Australian Government. "Water Act 2007." Dilihat 3 Januari 2017.
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2007A00137>

BBC News. "Australia Rejects Kyoto Pact." 5 Juni 2002. Dilihat 20 November 2016.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2026446.stm>

Biography. "Kevin Rudd Biography." Dilihat 13 November 2016.
<http://www.biography.com/people/kevin-rudd-38602#synopsis>

Boyle, Peter. "Julia Gillard: Change For The Better?." *Green Left Weekly*. Modifikasi terakhir 26 June 2010. Dilihat 2 Maret 2017.
<https://www.greenleft.org.au/content/julia-gillard-change-better>

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

- Carbon Brief Clean on Climate. "Carbon pricing schemes climb to \$50bn, despite Australian backtracking." Modifikasi terakhir 27 Mei 2015. Dilihat 12 Januari 2017. <https://www.carbonbrief.org/carbon-pricing-schemes-climb-to-50bn-despite-australian-backtracking>
- Chubb, Philip. "The Day The Rudd Government Lost Its Way On Climate Change." *The Age*. Dilihat 27 Februari 2017. <http://www.theage.com.au/insight/the-day-the-rudd-government-lost-its-way-on-climate-change-20140509-zr7fm.html>
- Commonwealth of Australia Parliamentary Speech House of Representatives. "Carbon Pollution Reduction Scheme Bill Official Hansard." 4 Februari 2009. Dilihat 20 Februari 2017
- Commonwealth of Australia Parliamentary Speech House of Representatives. "Carbon Pollution Reduction Scheme Bill Official Hansard." 2 June 2009. Dilihat 20 Februari 2017
- Coorey, Phillip. "Rudd In Freefall: Voters Lose Faith." *Sydney Morning Herald*. Modifikasi terakhir 10 Mei 2010. Dilihat 2 Maret 2017. <http://www.smh.com.au/national/rudd-in-freefall-voters-lose-faith-20100509-ulqh.html>
- Dodson, Louise dan Josh Gordon. "Howard defiant on Kyoto rejection." *The Age*. 5 September 2002. dilihat 20 November 2016, <http://www.theage.com.au/articles/2002/09/04/1031115885007.html>
- Dontenville, Adeline. "Australian Senate rejects CPRS... again." *Climatico Analysis*. Modifikasi terakhir 3 Desember. Dilihat 21 Februari 2017. <http://www.climaticoanalysis.org/post/australian-senate-rejects-cprs%E2%80%A6again>
- Kelly, Rick. "Australian Wheat Board implicated in "oil-for-food scandal." *World Socialist Web Site*. 14 November 2005. Dilihat 13 November 2016. <https://www.wsws.org/en/articles/2005/11/awb-n14.html>
- Liputan 6. "Perdana Menteri Kevin Rudd Mengundurkan Diri." Modifikasi terakhir 24 Juni 2010. Dilihat 2 Maret 2017. <http://global.liputan6.com/read/283055/perdana-menteri-kevin-rudd-mengundurkan-diri>
- Macau Daily Times. "Australia Passes Controversial Carbon Pollution Tax." Modifikasi terakhir 9 November 2011. Dilihat 2 Maret 2017. <http://macaudailytimes.com.mo/archive-2009-2014/asia-pacific/31255-australia-passes-controversial-carbon-pollution-tax.html>

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AUSTRALIA

Murray Darling Basin Authority. "Discover the Basin." Dilihat 5 Januari 2017.
<http://www.mdba.gov.au/discover-basin/water>

The Conversation. "Will The Buck Stop With Rudd On Fixing The Hospital System."
Dilihat 27 Februari 2017. <http://theconversation.com/will-the-buck-stop-with-rudd-on-fixing-the-hospital-system-15571>

The Greens. "The Greens Principles and Aims: Climate Change and Energy." Dilihat
28 Januari 2017. <http://greens.org.au/policies/climate-change-energy>

The Guardian. "Why Labor ditched Kevin Rudd." Modifikasi terakhir 24 Juni 2010.
Dilihat 27 Februari 2017.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/24/kevin-rudd-australia-labor>

United Nations Environment Programme. "Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment." dilihat 17 Juni 2016.
<http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503>

World Bank. "Pricing Carbon." Dilihat 12 Januari 2017.
<http://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#CarbonPricing>

<Wawancara>

Dr. Dafri Agussalim, wawancara oleh Ayudya Aroem Brilliane, 5 Januari 2017.

<Survey>

Survey oleh penulis. "Australia Political Issues Survey (Kevin Rudd Regime 2007-
2010)." 29 Januari 2017 – 19 Februari 2017.